



**SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227
Hayam Wuruk Plaza Lt.17, Jalan Hayam Wuruk No.108, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat 11160
website: www.komnasham.go.id email: info@komnasham.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 77 /KP.02.00/XII/2022

**TENTANG
PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan ditugaskan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melakukan pendaftaran online di SSCASN 2022;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Berkemampuan jasmani dan rohani;
10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pelamar merupakan lulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal **2.75 (dua titik tujuh lima)**.

B. Persyaratan Khusus

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Tingkat Dasar/ Level 1 **untuk jabatan Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.**

C. Dokumen Persyaratan

1. Dokumen persyaratan terdiri dari:
 - a. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah dengan ketentuan Pas Foto terbaru Pakaian Formal dengan Latar Belakang Merah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli/ Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;
 - d. Surat lamaran ditujukan Kepada Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (format surat lamaran dapat diunduh melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id>);
 - e. Daftar Riwayat Hidup (DRH) diketik menggunakan komputer dan ditandatangani (format surat lamaran dapat diunduh melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id>);
 - f. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - g. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - h. File Scan Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/ Swasta yang ditandatangani oleh Pejabat di tempat calon PPPK bekerja minimal 2-5 tahun sesuai dengan jenjang jabatan yang dilamar;
 - i. Bagi pelamar penyandang disabilitas, unggah:
 1. Hasil scan asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya, dalam 1 (satu) file format pdf; dan
 2. Video singkat dengan durasi 2 sampai 3 menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar dan mengirimkan file video tersebut melalui email <https://www.komnasham.go.id/seleksiPPPK/>. (ukuran maksimal video 20 MB).
2. Pendaftaran *online* dan unggah dokumen persyaratan dengan format **PDF** dilakukan pada tanggal 21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023 melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah **scan berkas asli berwarna** (tidak hitam putih);
4. Pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah dapat dibuka / file tidak rusak dan terbaca dengan jelas;

D. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023;
2. Pelamar harus membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran online dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran online;
3. Dalam melakukan pendaftaran, pelamar terlebih dahulu harus membuat akun pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai tata cara yang tertera pada laman dimaksud.

E. Jadwal Pelaksanaan

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	PengumumanSeleksi	20 Desember 2022 s.d 3 Januari 2023
2	Pendaftaran Seleksi (https://sscasn.bkn.go.id)	21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023

NO	KEGIATAN	TANGGAL
3	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023
4	Pengumuman hasil Seleksi Administrasi	12 s.d 15 Januari 2023
5	Masa Sanggah	16 s.d 18 Januari 2023
6	Jawab Sanggah	19 s.d 25 Januari 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d 28 Januari 2023
8	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d 22 Februari 2023
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	2 s.d 7 Maret 2023
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d 3 April 2023
11	Pengumuman Kelulusan	9 s.d 11 April 2023
12	Masa Sanggah Pasca Pengumuman Kelulusan	12 s.d 14 April 2023
13	Jawab Sanggah Pasca Pengumuman Kelulusan	14 s.d 20 April 2023
14	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 sd. 29 April 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d 22 Mei 2023
16	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d 20 Juni 2023

F. Tahapan Seleksi

1. Tahapan Seleksi
 - a. Seleksi Administrasi Verifikasi Dokumen Persyaratan Unggah Melalui Laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*.
 - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*;
2. Lokasi pelaksanaan seluruh tahapan seleksi akan disampaikan pada pengumuman selanjutnya.

G. Sistem Kelulusan

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah dan kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh panitia pada laman: <https://www.komnasham.go.id/seleksiPPPK/>. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman: <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Bagi pelamar penyandang disabilitas dilakukan verifikasi dokumen pelamaran dengan mencocokkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada bagian C.1. huruf i angka 1 dan 2 untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Pelamar penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan kemudian dibatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi, jika tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya serta video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
3. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan memperhatikan jenis formasi yang sama;
4. Pelamar seleksi PPPK yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan maka perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.

H. Lain-Lain

1. Pengumuman penerimaan dilakukan melalui website resmi Seleksi Komnas HAM (<https://www.komnasham.go.id/seleksiPPPK/>);
2. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
3. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan;
4. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
5. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat;
7. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
8. Jika dalam mengikuti tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terbukti peserta seleksi melanggar aturan dan ketentuan maka Panitia Seleksi berhak menggugurkan kepesertaan yang bersangkutan;
9. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/ tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
10. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
11. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
12. Semua pelamar disarankan dapat mengakses dan mempelajari bahan pada tautan <https://www.komnasham.go.id/#>, dan untuk Informasi lebih lanjut dapat dilihat di <https://www.komnasham.go.id/seleksiPPPK/>. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022 dapat menghubungi *Call Center* : Telepon 021-22686634 pada hari Senin s.d. Jumat Pukul 08.30 s.d. 16.00 WIB (selama masa seleksi berlangsung).

Jakarta, 20 Desember 2022

**Plt. Kepala Biro Umum
Ketua Panitia Seleksi,**



**Kurniasari Novita Dewi
NIP. 197311072005022001**

LAMPIRAN I PENGUMUMAN
 NOMOR : 77 /KP.02.00/XII/2022
 TENTANG PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
 PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 TAHUN ANGGARAN 2022

JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JUMLAH FORMASI DAN PENEMPATAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU HUKUM S-1 ADMINISTRASI NEGARA S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK S-1 MANAJEMEN S-1 ILMU PEMERINTAHAN	5	SEKRETARIS JENDERAL KOMNAS HAM, BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
2	AHLI PERTAMA - ANALIS SDM APARATUR	S-1 MANAJEMEN S-1 ADMINISTRASI PUBLIK S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	SEKRETARIS JENDERAL KOMNAS HAM, BIRO UMUM
3	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN D-IV ILMU KEARSIPAN S-1 ADMINISTRASI D-IV ILMU KOMUNIKASI S-1 ILMU KOMUNIKASI	4	SEKRETARIS JENDERAL KOMNAS HAM, BIRO UMUM
4	AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	S-1 ADMINISTRASI NEGARA S-1 PSIKOLOGI S-1 MANAJEMEN S-1 ADMINISTRASI PUBLIK S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIS JENDERAL KOMNAS HAM, BIRO UMUM , ASSESSOR SDM APARATUR
5	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 AKUNTANSI S-1 ILMU PEMERINTAHAN S-1 MANAJEMEN S-1 ILMU ADMINISTRASI	2	SEKRETARIS JENDERAL KOMNAS HAM, BIRO UMUM
6	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI S-1 ILMU KOMUNIKASI	3	SEKRETARIS JENDERAL KOMNAS HAM, BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL
7	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT S-1 ILMU KOMUNIKASI S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT D-IV ILMU KOMUNIKASI	1	SEKRETARIS JENDERAL KOMNAS HAM, BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJASAMA
8	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ARSIPARIS	8	SEKRETARIS JENDERAL KOMNAS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	PENEMPATAN
		D-III ARSIP D-III ILMU KOMUNIKASI		HAM, BIRO UMUM

Jakarta, 20 Desember 2022

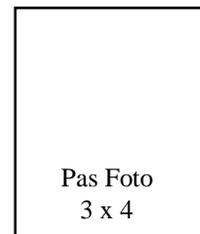
**Plt. Kepala Biro Umum
Ketua Panitia Seleksi,**



Kurniasari Novita Dewi
NIP. 197311072005022001

LAMPIRAN II PENGUMUMAN
 NOMOR : 77 /KP.02.00/XII/2022
 TENTANG PENERIMAAN CALON
 APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
 KERJA (PPPK) SEKRETARIAT
 JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK
 ASASI MANUSIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)		
2.	Nama		
			*)
3.	Kabupaten / Kota Tempat Lahir		
			*)
4.	Tanggal Lahir		
			*)
5.	Jenis Kelamin		
6.	Agama / Aliran Kepercayaan		
7.	Status Perkawinan		
8.	E-mail		
9.	Nomor Telepon / Handphone		
10.	Alamat	a. Jalan	
		b. Kelurahan / Desa	
		c. Kecamatan	
		d. Kabupaten / Kota	
		e. Provinsi	
11.	Keterangan Badan	a. Tinggi (cm)	
		b. BeratBadan (kg)	
		c. Rambut	
		d. Bentuk Muka	
		e. Warna Kulit	
		f. Ciri Khas	

		g. Cacat Tubuh	
12.	Kegemaran (Hobby)		

*) Ditulis dengan huruf Kapital/Balok dan tinta hitam

IV. RIWAYAT KELUARGA

1. Isteri /Suami

NO	NIK	NIP**	NAMA	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan / Posisi Jabatan	Perusahaan / Institusi	Status Perkawinan	Akte Nikah / Akte Cerai	Tanggal Menikah / Cerai / Meninggal	Status Hidup

2. Anak

NO	NIK	NIP**	NAMA	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan / Posisi Jabatan	Perusahaan / Institusi	Status Hidup

3. Orang Tua Kandung

NO	NIK	NIP**	NAMA	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan / Posisi Jabatan	Perusahaan / Institusi	Status Hidup

4. Saudara Kandung

NO	NIK	NIP**	NAMA	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan / Posisi Jabatan	Perusahaan / Institusi	Status Perkawinan	Status Hidup

5. Bapak / Ibu Mertua

NO	NIK	NIP**	NAMA	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan / Posisi Jabatan	Perusahaan/ Institusi	Status Perkawinan	Status Hidup

V. KETERANGAN ORGANISASI

NO	NAMA ORGANISASI	JABATAN ORGANISASI	Masa Kerja		Tempat	PEMIMPIN ORGANISASI
			Tanggal Mulai	Tanggal Selesai		

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

.....

(.....)

PERHATIAN

1. Harus ditulis dengan tangan sendiri , menggunakan capital / balok dan tinta hitam.
2. Pada bagian **) di isi hanya jika CPNS / PNS / Pensiunan PNS.
3. Kolom yang kosong diberi tanda Z.

LAMPIRAN III PENGUMUMAN
NOMOR : 77 /KP.02.00/XII/2022
TENTANG PENERIMAAN CALON
APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA (PPPK) SEKRETARIAT
JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK
ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN
2022

(Tempat, tanggal)

Yth.Sekretaris Jenderal Komnas HAM
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Alamat Domisili :

Dengan ini menyatakan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022. Sebagai bahan pertimbangan, berikut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah dengan ketentuan Pas Foto terbaru Pakaian Formal dengan Latar Belakang Merah;
2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli/ Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;
4. Surat lamaran ditujukan Kepada Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai
5. Daftar Riwayat Hidup (DRH) diketik menggunakan komputer dan ditandatangani
6. Ijazah asli;
7. Transkrip nilai asli;

Demikian surat lamaran ini dibuat, adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi PPPK Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

e-meterai

(Nama Pelamar)

LAMPIRAN IV PENGUMUMAN
NOMOR : 77 /KP.02.00/XII/2022
TENTANG PENERIMAAN CALON
APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA (PPPK) SEKRETARIAT
JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK
ASASI MANUSIA

>>> KOP SURAT<<<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja/Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Pendidikan :

Unit Kerja/Instansi :

Telah melaksanakan tugas sebagai Selama..... Tahun
..... bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan
tanggal.....Dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya uuntuk
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

e-materai
Rp. 10.000

Cap
Instansi

tdd

(Nama)